



JDIH



LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (LAKIP) BAGIAN HUKUM TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024.

Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN JEMBER



A. ZAENURROFIK, SH
Panaia Tingkat I
NIP. 19810529 201101 1 004

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN HUKUM.....	4
E. SARANA PRASARANA BAGIAN HUKUM.....	5
F. ANGGARAN BAGIAN HUKUM.....	7
G. ISU STRATEGIS.....	9
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS	10
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	13
C. PERJANJIAN KINERJA	17
D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	20
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJATAHUN 2024	20
B. CAPAIAN KINERJA BAGIAN HUKUM	21
C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN	26
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA	31
E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN.....	32
F. REALISASI ANGGARAN	37
BAB IV. PENUTUP.	40
LAMPIRAN	
Lampiran 1. IKU PD	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
Lampiran 3. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026	
Lampiran 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	
Lampiran 5. Cascading Bagian Hukum	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Bagian Hukum disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Bagian Hukum tahun 2024 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bagian Hukum Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bagian Hukum Tahun 2024

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan, Jumlah Perda yang sudah diusulkan ke DPRD;
2. Jumlah Perkara yang dapat diselesaikan, Bantuan Hukum miskin yang dapat dibantu; dan
3. Jumlah Produk Hukum yang terpublikasikan dan dapat diakses oleh Masyarakat.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Bagian Hukum tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Sasaran 2 : Meningkatnya pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan dan bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin.

Sasaran 3 : Meningkatnya pemberian informasi hukum kepada masyarakat.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Bagian Hukum telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 10 (sepuluh) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Baik** dan **Baik**, 1 (satu) indikator capaiannya **Cukup**, dan **1 (satu)** capaian dalam kategori **Kurang**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari Belanja Operasional dan Kegiatan sebesar Rp3.721.625.800 dan Belanja Modal sebesar Rp211.019.200.

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.644.681.622 atau 67,25% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31

Desember 2023 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan ada efisiensi dan pergeseran anggaran dalam penggunaan untuk pencapaian kinerja yang disebabkan tambahan kegiatan mengikuti kebijakan prioritas Kepala Daerah tahun anggaran 2024.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain:

1. Masih kurangnya personil yang mumpuni dalam mengakomodir semua kegiatan teknis yang ada, terutama dibidang penyusunan produk hukum dan pendokumentasian produk hukum.
2. Untuk Belanja Modal, terdapat kendala adanya beberapa barang yang tidak dapat direalisasikan karena adanya kenaikan harga di e-catalog dari imbas kebijakan yang mengharuskan pengadaan Belanja Modal harus memprioritaskan pembelian barang yang ber TKDN tinggi, sedangkan harga diperencanaan masih mengikuti harga lama ditahun 2023 yang jauh lebih rendah dari harga di e-catalog tahun 2024.
3. Terkait Sub Kegiatan Belanja Tenaga Ahli dalam menginventarisasi produk hukum daerah, terdapat kendala tidak dapat teralisasi dikarenakan tenaga ahli yang direncanakan akan berkerja sama sudah tidak berkanan untuk melakukan kajian inventarisasi produk hukum daerah ditahun 2024 dengan alasan kurangnya personil serta perubahan kebijakan intern yang ada di Intansinya.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2025 antara lain :

1. Dapat dipenuhinya personil pada setiap jabatan yang masih kosong disesuaikan dengan Analisa Jabatan dan Kebutuhan Jabatan pada Bagian Hukum.
2. Lebih mengukur kemungkinan-kemungkinan terjadinya kenaikan harga barang dalam pengadaan Belanja Modal .
3. Perlu adanya kepastian yang lebih terukur dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak luar agar mengurangi kemungkinan tidak teralisasinya kegiatan yang sudah direncanakan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Bagian Hukum diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Hukum tahun 2024

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Bagian Hukum dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Bagian Hukum adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Bagian Hukum.
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BAGIAN HUKUM

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Bagian Hukum diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 44 tahun 2023 sebagai berikut :

- (1) Bagian Hukum merupakan unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.
- (2) Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- (3) Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Bagian Hukum dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hokum serta dokumentasi dan informasi;

- b. penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- e. penyiapan dan penyajian bahan rancangan produk hokum daerah berupa regulasi maupun legislasi daerah;
- f. pengkajian perundang-undangan terhadap penyeelenggaraan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- g. penyiapan telaahan bahan pertimbangan hukum dan pelayanan bantuan hukum kepada unsur Pemerintah Daerah terkait permasalahan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan desa;
- h. pelaksanaan pembinaan hokum maupun penyuluhan hokum kepada aparatur perangkat daerah, perangkat desa dan masyarakat;
- i. pemberian pelayanan bantuan hokum kepada aparatur pemerintah daerah;
- j. pendampingan masyarakat miskin yang terkena masalah hokum baik secara litigasi dan non litigasi;
- k. penghimpunan peraturan perundang-undangan, publikasi dan dokumentasi serta sosialisasi produk hokum daerah;
- l. penyusunan program legislasi daerah;
- m. pelaksanaan fasilitasi penetapan produk hokum daerah; dan
- n. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

(5) Susunan organisasi Bagian Hukum terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Bagian Hukum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 1. Bagian Perekonomian dan SDA terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas
 - a. Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
 1. Bagian Organisasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari
 - a. Sub Bagian Protokol; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bagian Umum terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Unit Pelaksana Teknis Daerah

D. SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN HUKUM

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Bagian Hukum yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Bagian Hukum yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 12 (dua belas) orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 14 (empat belas) orang atau 14%.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Bagian Hukum Tahun 2024

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	Σ	SMA	D3	S1	S2	Σ	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi													
Jabatan Administrasi													
1. Administrator	1			1		1				1		1	
2. Pengawas													
3. Pelaksana	13	3	3	7		5		3		2		9	2
Jabatan Fungsional	12			12									
Non ASN						6		4		2			
Jumlah	26	3	3	20	0	12	0	7	0	5	0	10	2

Sumber : Data Kepegawaian Bagian Hukum 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan *bezetting* pegawai. Jumlah pegawai Bagian Hukum belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Bagian Hukum. Kebutuhan dibagian Hukum Setda Kabupaten Jember masih kurang sekitar 8 (delapan) orang pada Jabatan Pelaksana, dan 12 (dua belas) orang pada Jabatan Fungsional.

Kebutuhan Jabatan Fungsional sangat penting dikarenakan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan Analisa, Evaluasi Daerah sangat bergantung pada keahlian dan pengetahuan dari Jabatan Analis Hukum, Penyuluh Hukum. Sedangkan untuk Penyusunan Produk Hukum berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Setiap Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang merupakan Jabatan Fungsional.

E. SARANA PRASARANA BAGIAN HUKUM

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Bagian Hukum menempati gedung di Jl. Sudarman 1 Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Bagian Hukum kurang memadai, karena penambahan arsip aktif setiap tahun meningkat sedangkan bangunan kantor tidak dapat direnovasi secara mandiri, adapun data sarana dan prasarana pada Bagian Hukum adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Bagian Hukum
Per 31 Desember 2024

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
1	Alat Pendingin	3	Baik	3
2	Alat Pemadam	2	Baik	2
3	Alat Pemotong	1	Baik	1
4	Audio Amplifier	1	Baik	1
5	Brandkas	2	Baik	2
6	Camera Digital	1	Baik	1
7	Coffee Maker	1	Baik	1
8	Compact Disc	1	Baik	1
9	Dst.. ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	6	Baik	6
10	Dst.. KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	1	Baik	1
11	External/ Portable Hardisk	4	Baik	4
12	Facsimile	1	Baik	1
13	Filing Cabinet Besi	3	Baik	3
14	Handy Talky (Ht)	2	Baik	2
15	Head Set	7	Baik	7
16	Kursi Besi/Metal	17	Baik	17
17	Kursi Fiber Glas/Plastik	2	Baik	2
18	Kursi Kayu	6	Baik	6
19	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iii	1	Baik	1
20	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	3	Baik	3
21	Lap Top	6	Baik	6
22	Layar Film/Projector	2	Baik	2
23	Lcd Projector/Infocus	1	Baik	1
24	Lemari Besi/Metal	7	Baik	7
25	Lemari Es	1	Baik	1

26	Lemari Kaca	3	Baik	3
27	Loudspeaker	2	Baik	2
28	Meja 1/2 Biro	11	Baik	11
29	Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	3	Baik	3
30	Meja Komputer	2	Baik	2
31	Microphone/Wireless Mic	1	Baik	1
32	P.C Unit	15	Baik	15
33	Papan Nama Instansi	1	Baik	1
34	Papan Visual/Papan Nama	1	Baik	1
35	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15	Baik	15
36	Rak Kayu	1	Baik	1
37	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Baik	2
38	Sepeda Motor	6	Baik	6
39	Sofa	1	Baik	1
40	TEKO LISTRIK	2	BAIK	2
41	VOICE RECORDER	1	BAIK	1
42	Mesin Absensi	1	Rusak	1
43	Uninterruptible Power Supply (Ups)	1	Rusak	1
44	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	Rusak	1
45	Compact Disc	1	Rusak	1
46	A.C. Window	1	Rusak	1
47	P.C Unit	7	Rusak	7
48	Note Book	3	Rusak	3
49	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	Rusak	8
50	Note Book	2	Rusak	2
51	Camera Video	1	Rusak	1
52	Handy Cam	1	Rusak	1
Jumlah		149	BAIK	149
		27	RUSAK	27

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Bagian Hukum Tahun 2024

F. ANGGARAN BAGIAN HUKUM

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bagian Hukum pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Bagian Hukum memiliki 2 (dua) Program, 3 (tiga) Kegiatan, dan 9 (Sembilan) Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan

alokasi anggaran sebesar Rp **3.932.645.000,-** sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Anggaran Bagian Hukum
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 1.531.557.000
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp 1.635.600
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Rp 408.900
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Rp 408.900
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA -SKPD	Rp 408.900
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA -SKPD	Rp 408.900
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp 114.480.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 114.480.000
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 63.750.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 63.750.000
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp 673.145.700
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 225.746.400
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 211.019.200
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 10.650.100
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 7.230.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 218.500.000
1.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 653.545.700
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 9.300.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 10.800.700
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 633.445.000
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 25.000.000

	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 25.000.000
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 2.401.088.000
2.1	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp 2.401.088.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp 606.683.200
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp1.700.404.800
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp 94.000.000
	JUMLAH	Rp. 3.932.645.000

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Tahun 2024

G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Bagian Hukum dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Proses Harmonisasi dan Fasilitasi produk hukum daerah yang berbentuk peraturan Kepala Daerah/ Bupati, masih terdapat kendala dalam proses menunggu hasil Harmonisasi dan Fasilitasi relatif lama;
2. Peningkatan Pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan aparat pemerintah; dan
3. Peningkatan publikasi dan dokumentasi produk hukum daerah yang dapat diakses oleh Masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Bagian Hukum merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: “Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akeselerasi dalam membangun Jember.” Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

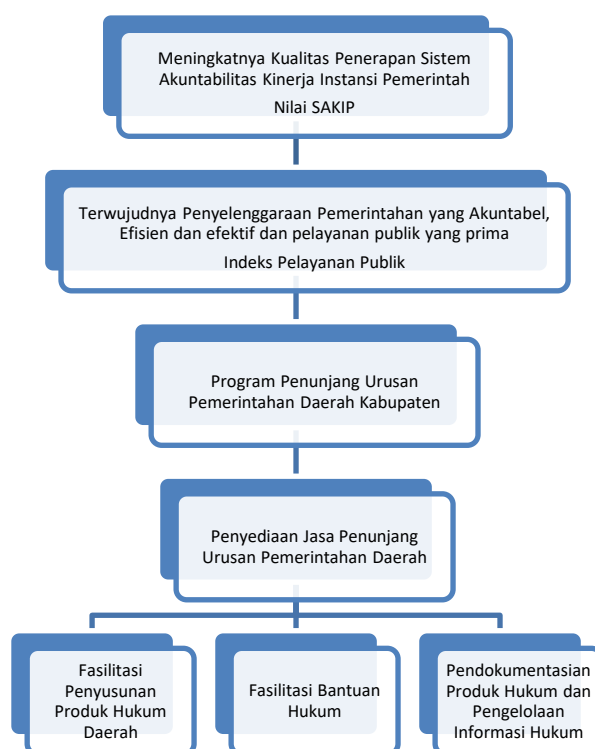
Sesuai *cascade* kinerja, Bagian Hukum Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Bagian Hukum yaitu

- 1) Misi ke-2: Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

- 2) Tujuan ke-3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 3) Sasaran Strategis Kabupaten : Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Sasaran Strategis Perangkat daerah (Sekretariat Daerah) : Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dan sasaran Bagian Hukum yang diformulasikan dalam jangka menengah dan tahunan pada Rencana Strategis adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1
Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Bagian Hukum
Tahun 2021-2026

Sasaran Bagian Hukum	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
SEBELUM PERUBAHAN							
Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan, Jumlah Perda yang sudah diusulkan ke DPRD	100%	673	675	676	678	680
Meningkatnya Pendampingan dan Penyelesaian Permasalahan Hukum	Jumlah Perkara yang dapat diselesaikan, Bantuan Hukum miskin yang dapat dibantu	100%	113	114	115	116	117
Persentase jumlah produk hukum yang sudah diupload di JDIH	Jumlah Produk Hukum yang terpublikasi dan dapat diakses oleh masyarakat	100%	600	610	615	620	625

Setelah Perubahan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Bagian Hukum	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun			100 %	100 %	100 %	100 %
Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan pada Bagian Hukum	Persentase administrasi keuangan yang terkelola			100 %	100 %	100 %	100 %

Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian pada Bagian Hukum	Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya			100 %	100 %	100 %	100 %
Peningkatan Kualitas Administrasi Umum pada Bagian Hukum	Persentase Administrasi Umum yang terkelola			100 %	100 %	100 %	100 %
Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Bagian Hukum	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat, Jasa Telpon dan Jasa Tenaga Administrasi (non ASN)			100 %	100 %	100 %	100 %
Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Bagian Hukum	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas serta sarana dan prasarana lainnya			100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase kualitas produk hukum daerah yang terfasilitasi			100 %	100 %	100 %	100 %

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase produk hukum daerah yang terfasilitasi	<p>Formulasi : Jumlah Produk hukum daerah terselesaikan fasilitasnya dibagi jumlah usulan produk hukum daerah yang masuk) x 100%</p> <p>Penjelasan : a. Produk hukum daerah terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati b. Produk hukum daerah yang terfasilitasi , memenuhi kategori berikut : - Produk hukum telah ditetapkan, dan - Produk hukum telah terdokumentasi dalam JDIH</p>	Bagian Hukum Setda Kab Jember	<ul style="list-style-type: none"> - Register Perda - Register Perbup - Register SK - Daftar Penerima Bantuan Hukum - Daftar Perkara - Website JDIH

TABEL 2.3
INDIKATOR KINERJA (PENDUKUNG KINERJA UTAMA)

Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja (Pendukung Kinerja Utama)	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Bagian Hukum	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	<p>Formulasi : $4 \text{ Dokumen target dibagi } 4 \text{ Dokumen teralisasi} \times 100\% = 100\%$ (Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun dibagi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang seharusnya tersedia menurut ketentuan per UU) x 100%</p> <p>Penjelasan : Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi terdiri dari : Dokumen RKA-SKPD, Perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, Perubahan DPA-SKPD</p>	Bagian Hukum Setda Kab Jember	
Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan pada Bagian Hukum	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	<p>Formulasi : (jumlah paket administrasi keuangan yang terlaksana sesuai ketentuan dibagi paket administrasi keuangan yang direncanakan) x 100%</p> <p>Penjelasan : Administrasi keuangan terdiri dari honorarium pjb pengelola keuangan</p>		

<p>Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian pada Bagian Hukum</p>	<p>Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya</p>	<p>Terpenuhinya ketersediaan pakaian dinas dan pakaian olahraga kantor 17 orang (perencanaan)/ 12 orang (realisasi) = 2,83%</p> <p>Formulasi : (jumlah paket administrasi kepegawaian yang terlaksana sesuai ketentuan dibagi paket administrasi kepegawaian yang direncanakan) x 100%</p> <p>Penjelasan : Administrasi kepegawaian terdiri dari : - Administrasi penyediaan pakaian dinas lapangan aparaturnya Bagian Hukum - Administrasi penyediaan pakaian olahraga aparaturnya Bagian Hukum</p>		
<p>Peningkatan Kualitas Administrasi Umum pada Bagian Hukum</p>	<p>Persentase Administrasi Umum yang dikelola</p>	<p>Formulasi : (jumlah paket administrasi umum yang terlaksana sesuai ketentuan dibagi paket administrasi umum yang direncanakan) x 100%</p> <p>Penjelasan : Administrasi umum terdiri dari : - Administrasi penyediaan perlengkapan kebersihan - Administrasi penyediaan peralatan perkantoran</p>		
<p>Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Bagian Hukum</p>	<p>Persentase Jasa Surat Menyurat, Jasa Telpon dan Jasa Tenaga Administrasi (non ASN)</p>	<p>Formulasi : (jumlah paket jasa penunjang yang terlaksana sesuai ketentuan dibagi paket jasa penunjang yang direncanakan) x 100%</p> <p>Penjelasan : Jasa Penunjang terdiri dari : - Penyediaan Jasa Surat Menyurat, materai dan benda pos</p>		

		- Penyediaan Jasa Telpn - Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi (non ASN)		
Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Bagian Hukum	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas serta sarana dan prasarana lainnya	Formulasi : (jumlah peralatan dan kendaraan dinas Bagian Hukum yang siap pakai dibagi jumlah peralatan dan kendaraan dinas yang ada) x 100% Penjelasan : data jumlah peralatan dan kendaraan dinas bagian hukum berdasarkan data pada KIB Bagian Hukum		

Sumber : Keputusan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Nomor 1 tentang Indikator Kinerja Bagian Hukum Tahun 2024

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024. Beberapa indikator penghargaan yang ditambahkan dalam PK 2024 dalam rangka mendukung sasaran Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan adalah :

1. JDIH Award dari Kementerian Hukum dan HAM;
2. Kota/Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM; dan
3. *Non Litigation Peace Maker* dari Kementerian Hukum dan HAM.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Bagian Hukum Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Bagian Hukum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Bagian Hukum	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%
2	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan pada Bagian Hukum	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%
3	Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian pada Bagian Hukum	Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%
4	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum pada Bagian Hukum	Persentase Administrasi Umum yang terkelola	100%
5	Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Bagian Hukum	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat, Jasa Telpon dan Jasa Tenaga Administrasi (non ASN)	100%
6	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Bagian Hukum	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas serta sarana dan prasarana lainnya	100%
7	Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Produk Hukum Daerah	Persentase kualitas produk hukum daerah yang terfasilitasi 1. JDIH Award dari KemenKUMHAM 2. Kota / Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari KemenKUMHAM 3. NonLitigation Peacemaker dari KemenKUMHAM	100% 1 penghargaan 1 penghargaan 1 penghargaan

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Bagian Hukum tahun 2024

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Rp1.531.557.000 Sumber Dana : APBD
 - a. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Rp1.531.557.000 Sumber Dana : APBD
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Rp2.401.088.000 Sumber Dana : APBD
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Rp1.635.600 Sumber Dana : APBD
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Rp 114.480.000 Sumber Dana : APBD
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Rp63.750.000 Sumber Dana : APBD
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Rp673.145.700 Sumber Dana : APBD
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Rp653.545.700 Sumber Dana : APBD
 - f. Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Rp25.000.000 Sumber Dana : APBD

Total Jumlah Anggaran Sebesar **Rp3.932.645.000** (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Bagian Hukum terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

Sasaran didukung oleh 2 Program, yaitu :

- Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan Anggaran Rp1.531.557.000,-
- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Anggaran Rp Rp2.401.088.000,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah **Rp3.932.645.000** (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang teralokasi sebagai berikut, sebesar 39% untuk program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang dimana merupakan kegiatan dan sub kegiatan bersifat rutin yang menunjang dalam meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran. Sedangkan sebesar 61% anggaran dialokasikan untuk Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang merupakan kegiatan dan sub kegiatan bersifat tupoksi serta teknis dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Bagian Hukum dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Bagian Hukum menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :

- a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA BAGIAN HUKUM

Bagian Hukum telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Bagian Hukum tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Bagian Hukum dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

Tabel 3.2
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4 *100%)	7	8 (5/7 *100%)
	Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Bagian Hukum	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan pada Bagian Hukum	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian pada Bagian Hukum	Persentase Pemenuhan Adminisrasi Kepegawaian (pakaian dinas beserta perlengkapannya)	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum pada Bagian Hukum	Persentase Administrasi Umum yang terkelola	100%	80%	80%	100%	80%
	Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Bagian Hukum	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang (Jasa Surat Menyurat, Jasa Telpon dan Jasa Tenaga Administrasi /non ASN)	100%	100%	100%	100%	100%

	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Bagian Hukum	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas serta sarana dan prasarana lainnya	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Fasilitas dan Koordinasi Produk Hukum Daerah	Persentase produk hukum daerah yang terfasilitasi	673	584	86,7%	100%	86,7%
		JDIH Award dari KemenKUMHAM	1	1	100%	100%	100%
		Kota / Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari KemenKUMHAM	1	1	100%	100%	100%
		NonLitigation Peacemaker dari KemenKUMHAM	1	1	100%	100%	100%

Sumber Data Realisasi : *Data kinerja sasaran kegiatan Bagian hukum tahun 2024.*

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (jumlah) 14 (empat belas) indikator sasaran Bagian Hukum rata rata mencapai rata-rata 90% dan masuk dalam kategori Tinggi. Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan Kinerja yang cukup baik diukur dari besarnya beban kerja tiap pegawai berdasarkan jumlah sub kegiatan dan anggaran yang dikelola.

Dengan demikian maka secara umum Bagian Hukum telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Pendukung Urusan Pemerintahan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bagian Hukum tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Peningkatan Kualitas Perencanaan, perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%	100%	0%	100%
Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Adminisrasi Kepegawaian (pakaian dinas beserta perlengkapannya)	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Kualitas Administrasi Umum	Persentase Administrasi Umum yang terkelola	100%	100%	100%	80%
Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Bagian Hukum	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang (Jasa Surat Menyurat, Jasa Telpon dan Jasa Tenaga	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas serta sarana dan prasarana lainnya	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Produk Hukum Daerah	Persentase produk hukum daerah yang terfasilitasi	100%	100%	100%	86,7%
	JDIH Award dari KemenKUMHAM	-	-	100%	100%
	Kota / Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari KemenKUMHAM	100%	100%	100%	100%
	NonLitigation Peacemaker dari KemenKUMHAM	-	-	-	100%

Sumber Data Realisasi: LRA Bagian Hukum Tahun 2024

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 s/d 6 :

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren realisasi anggaran dominan 100% antara tahun 2021 s.d 2024 yang dikarenakan Sebagian besar kegiatan bersifat kegiatan rutin operasional kantor.

Sasaran Strategis 7 :

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan untuk produk hukum daerah mengalami penurunan jumlah fasilitasi produk hukum dikarenakan regulasi dan kebijakan yang berimbas dari tahun politik pada tahun 2024. Sedangkan untuk penghargaan JDIH Award baru dilaksanakan pada tahun 2023 dan NonLitigation Peacemaker Award baru diadakan pada tahun 2024.

Tabel 3.4

(Perbandingan Realisasi Kinerja Bagian Hukum dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Nasional/ Prov. Jatim/ Kabupate	Ket. (+/-)
	Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang	100%	-	
	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan	Persentase administrasi keuangan	100%	-	
	Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Adminisrasi Kepegawaian (pakaian dinas	100%	-	
	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum	Persentase Administrasi Umum yang dikelola	80%	-	
	Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Bagian Hukum	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang (Jasa Surat Menyurat, Jasa Telpon dan Jasa	100%	-	

	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas serta sarana dan prasarana lainnya	100%	-	
	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Produk Hukum Daerah	Persentase kualitas produk hukum daerah yang terfasilitasi	86,7%	-	
		JDIH Award dari KemenKUMHAM	100%	-	
		Kota / Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari KemenKUMHAM	100%	-	
		NonLitigation Peacemaker dari KemenKUMHAM	100%	-	

Sumber Data: realisasi kinerja Bagian Hukum tahun 2024

Realisasi kinerja atas indikator kinerja bagian Hukum tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.

C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.5
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
Sasaran 1 :	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat			
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp2.401.088.000	1.754.668.000	73,07%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp606.683.200	Rp321.140.500	52,93%

	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Rp1.700.404.800	Rp1.381.927.500	81,27%
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp94.000.000	Rp51.600.000	54,89%
Sasaran 2 :	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp1.635.600	Rp 384.000	23,47%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp408.900	Rp	0%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp408.900	Rp 384.000	93,91%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp408.900	Rp	0%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp408.900	Rp	0%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp114.480.000	Rp 95.660.000	83,56%
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp114.480.000	Rp 95.660.000	83,56%

	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp63.750.000	Rp45.000.000	70,59%
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp63.750.000	Rp45.000.000	70,59%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp673.145.700	Rp506.780.300	75,28%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp211.019.200	Rp100.000.000	47,39%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp10.650.100	Rp10.564.000	99,19%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp225.746.400	Rp185.884.685	82,34%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp7.230.000	Rp7.229.200	99,99%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp218.500.000	Rp203.102.415	92,95%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp678.545.700	Rp242.189.322	35,69%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp9.300.000	Rp4.150.000	44,62%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp10.800.700	Rp7.666.822	70,98%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp633.445.000	Rp205.527.500	32,45%

	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp25.000.000	Rp24.845.000	99,38%
Total		Rp3.932.645.000	Rp2.644.681.622	67,25%

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran **Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan** adalah sebagai berikut :

1. Program : Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
 Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp606.683.200		
Output	Jumlah dokumen Perda, Perbup dan SK	Dokumen	673	584



Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp1.700.404.800		
Output	Jumlah perkara dan bantuan hukum yang difasilitasi	Kegiatan	215	232



Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp		
Output	Jumlah dokumen yang terupload pada laman JDIH	Dokumen	12	431



D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Bagian Hukum berjumlah 12 orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp3.932.645.000, melaksanakan 2 program 6 kegiatan dan 18 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Bagian Hukum	100%	23,47%	Efisien
Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan pada Bagian Hukum	100%	83,56%	Efisien
Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian pada Bagian Hukum	100%	70,59%	Efisien
Peningkatan Kualitas Administrasi Umum pada Bagian Hukum	100%	75,28%	Efisien
Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Bagian Hukum	78%	35,69%	Efisien
Peningkatan Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Produk Hukum Daerah	96%	73,07%	Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2; data % serapan anggaran pada tabel

Capaian kinerja Sasaran dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Bagian Hukum menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab (keberhasilan / kegagalan) capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Bagian Hukum	100%	√				
Indikator Sasaran : Tercapainya Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	√				
Rata rata capaian	100%	√				
Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan pada Bagian Hukum	100%	√				
Indikator Sasaran : Tercapainya Kualitas Administrasi Keuangan	100%	√				
Rata rata capaian	100%	√				
Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian pada Bagian Hukum	100%	√				
Indikator Sasaran : Tercapainya Kualitas Administrasi Kepegawaian	100%	√				
Rata rata capaian	100%	√				
Peningkatan Kualitas Administrasi Umum pada Bagian Hukum	78%			√		

Indikator Sasaran : Tercapainya Kualitas Administrasi Umum	78%			√		
Rata rata capaian	78%			√		
Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Bagian Hukum	100%	√				
Indikator Sasaran : Tercapainya Kualitas Jasa Penunjang	100%	√				
Rata rata capaian	100%	√				
Peningkatan Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Produk Hukum Daerah	96%		√			
Indikator Sasaran : Tercapainya Fasilitasi dan Koordinasi Produk Hukum Daerah	96%		√			
Rata rata capaian	96%		√			

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Produk Hukum Daerah, merupakan indikator kinerja utama Bagian Hukum. Realisasi 96% didapatkan dari perhitungan : jumlah usulan produk hukum (peraturan daerah, peraturan bupati dan Keputusan bupati, Keputusan Sekretaris Daerah) yang difasilitasi dibandingkan dengan jumlah seluruh usulan produk hukum) x 100%.

Kriteria produk hukum yang selesai terfasilitasi berdasarkan SK IKU Bagian Hukum adalah :

- Produk hukum telah ditetapkan, dan
- Produk hukum telah terdokumentasi dalam JDIH.

Rincian produk hukum tahun 2024 :

No	Produk Hukum	Jumlah usulan	Jumlah usulan yang selesai difasilitasi
1.	Peraturan Daerah	14	6
2.	Peraturan Bupati	41	33
3.	Keputusan Bupati	550	545
	Jumlah	603	584

Yang tidak selesai terfasilitasi sejumlah : 21

Disebabkan oleh beberapa permasalahan/ kendala, antara lain :

- Berkurangnya personal pada Bagian Hukum;
- Kurangnya personal yang memfasilitasi pada Biro Hukum; dan
- Pada tahun 2024 bertepatan dengan waktu kampanye anggota DPRD yang berdampak pada jadwal pembahasan raperda yang diusulkan.

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Jumlah Perkara yang difasilitasi dan Jumlah dokumen

yang terupload di JDIH mencapai predikat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %,

- Penyebab keberhasilan antara lain adalah tingginya permohonan fasilitasi perkara dan kebutuhan atas produk hukum daerah yang diajukan ke Bagian Hukum.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah perlu adanya penambahan personal untuk mengakomodir tambahan beban kerja yang dihadapi.
- Rencana perbaikan kedepan apa dengan menambah personal yang dapat mengurangi beban kerja atau membagi beban kerja secara merata
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain menggunakan bantuan teknologi yang mampu membantu kegiatan administrasi pelaporan dan kearsipan.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Kualitas, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Bagian Hukum.

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran 100 % mencapai predikat Sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %,

- Penyebab keberhasilan antara lain merupakan kegiatan rutin.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah perlu adanya tambahan personel.
- Rencana perbaikan kedepan apa lebih meningkatkan perencanaan dan inovasi pengembangan program dan kegiatan
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain perlu adanya pelatihan teknis terkait perencanaan secara rutin.

Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan pada Bagian Hukum

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran 100% mencapai predikat sangat yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %,

- Penyebab keberhasilan antara lain merupakan kegiatan pengelolaan keuangan yang bersifat pemberian honorarium.
- Rencana perbaikan kedepan untuk pengelolaan keuangan dan kegiatan lebih berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan terbaru.
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain adanya bimbingan teknis/pelatihan secara rutin terhadap pejabat pengelola keuangan dan kegiatan.

Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian pada Bagian Hukum.

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran 100% mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %,

- Penyebab keberhasilan antara lain merupakan kegiatan rutin.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah perlu adanya tambahan personal yang kusus menangani kepegawaian agar tidak menjadi tambahan beban kerja.

- Rencana perbaikan kedepan perlu adanya tambahan personil yang menangani tentang Administrasi Kepegawaian.
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain koordinasi dan Konsultasi kebutuhan personil.

Sasaran Strategis 5 : Peningkatan Kualitas Administrasi Umum pada Bagian Hukum. Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran 100% mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 78 %,

- Penyebab keberhasilan antara lain adalah jadwal pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan intensitas kerja yang padat dengan keterbatasan personil yang ada.
- Penyebab kegagalan antara lain dalam pengadaan belanja modal adanya harga barang yang sudah dianggarkan lebih rendah dari harga di e-catalog.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah perlu menyesuaikan regulasi dan harga barang yang tertera pada e-catalog agar barang yang sudah direncanakan dapat dapat teralisasi.
- Rencana perbaikan kedepan perlu adanya koordinasi yang baik antara perencanaan, keuangan dan pelaksana kegiatan agar kegiatan dapat berjalan sesuai rundown yang sudah direncanakan.

Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Bagian Hukum.

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran 100% mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %,

- Penyebab keberhasilan antara lain merupakan kegiatan rutin berupa honorarium Pegawai Non ASN.

F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Hukum, pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar **Rp3.932.645.000** yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp3.721.625.800,-
terrealisasi sebesar Rp2.544.681.622,- (68,3%)
2. Belanja Modal sebesar Rp211.019.200,-
terrealisasi sebesar Rp100.000.000,- (47,39%)

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Bagian Hukum Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Rp408.900	Rp0	0%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Rp408.900	Rp 384.000	93,91%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp408.900	Rp	0%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp408.900	Rp	0%
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp114.480.000	Rp 95.660.000	83,56%
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp63.750.000	Rp45.000.000	70,59%
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp225.746.400	Rp185.884.685	82,34%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp211.019.200	Rp100.000.000	47,39%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp10.650.100	Rp10.564.000	99,19%

	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp7.230.000	Rp7.229.200	99,99%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp218.500.000	Rp203.102.415	92,95%
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uraan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp9.300.000	Rp4.150.000	44,62%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp10.800.700	Rp7.666.822	70,98%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp633.445.000	Rp205.527.500	32,45%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp25.000.000	Rp24.845.000	99,38%
1.6	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp606.683.200	Rp321.140.500	52,93%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp1.700.404.800	Rp1.381.927.500	81,27%
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp94.000.000	Rp51.600.000	54,89%
	JUMLAH	Rp3.932.645.000	Rp2.644.681.622	67,25%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Bagian Hukum Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Bagian Hukum ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Bagian Hukum sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Bagian Hukum masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya personil yang mumpuni dalam mengakomodir semua kegiatan teknis yang ada, terutama dibidang penyusunan produk hukum dan pendokumentasian produk hukum.
2. Keterbatasan anggaran serta penambahan kegiatan mengikuti kebijakan pimpinan mengharuskan pergeseran anggaran dari kegiatan yang skala prioritasnya kurang ke kegiatan yang skala prioritasnya lebih dibutuhkan.
3. Belum adanya kegiatan pelatihan atau peningkatan kemampuan kinerja seperti Bimtek ataupun uji kompetensi yang dilaksanakan secara rutin pada personil bagian hukum terkait pelaksanaan teknis kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya antara lain :

1. Dapat dipenuhinya personil pada setiap jabatan yang masih kosong disesuaikan dengan Analisa Jabatan dan Kebutuhan Jabatan pada Bagian Hukum.
2. Kecukupan anggaran disesuaikan dengan perencanaan kegiatan yang sudah ditentukan pada Renstra serta menambah anggaran apabila terdapat tambahan kegiatan baru yang harus dilaksanakan.
3. Perlu adanya Pelatihan atau Bimbingan Teknis serta Uji Kompetensi yang dilaksanakan secara rutin tiap tahun sebagai peningkatan standart minimal kinerja pada Bagian Hukum Kabupaten Jember.

Demikian Laporan Kinerja Bagian Hukum yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan yang dilaporkan pada tahun 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN SUDARMAN NO. 1 TELP. (0331) – 424044 JEMBER 68111

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 065/ 1 / HK /1.12/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN JEMBER

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Bagian Hukum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini tersebut dalam lampiran.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini bertujuan untuk :
- (1) memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - (2) mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dalam :
- a. perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
 - b. perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
 - d. pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
 - e. evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember.
- KEENAM : Keputusan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM



A. ZAENURROFIK, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19810529 201101 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

- Instansi** : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- Tujuan** : Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib, nyaman dan berkeadilan.
- Tugas** : Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi dan urusan pemerintahan bidang penunjang serta tugas pembantuan.
- Fungsi** :
- a. Pelaksanaan kebijakan dalam penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah;
 - b. Penyiapan dan penyajian bahan rancangan produk hukum Kabupaten berupa regulasi maupun legislasi Kabupaten;
 - c. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Penyelenggaraan Pemerintah;
 - d. Penyiapan telaah bahan pertimbangan hukum dan pelayanan hukum Kabupaten maupun Produk Hukum Kabupaten terkait permasalahan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten;
 - e. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat Kabupaten Jember.
- Indikator Tujuan** :
- a. Jumlah Produk Hukum Daerah;
 - b. Pelayanan dan Bantuan Hukum;
 - c. Jumlah Sosialisasi Produk Hukum;

Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Perda yang diusulkan ke DPRD; 2. Peraturan Bupati yang dihasilkan; 3. Jumlah Keputusan Bupati yang dihasilkan. 	Jumlah OPD yang mengajukan penerbitan Keputusan Bupati, Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah.	OPD di Pemerintah Kabupaten Jember	Bagian Hukum Setda. Kab. Jember
Meningkatnya Pendampingan dan Penyelesaian Permasalahan Hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase penyelesaian permasalahan hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan; 2. Prosentase bantuan hukum bagi masyarakat miskin 	Jumlah perkara yang terfasilitasi serta jumlah bantuan hukum masyarakat miskin yang diberikan	OBH yang terakreditasi di Kabupaten Jember	Bagian Hukum Setda. Kab. Jember
Meningkatnya pemberian informasi hukum kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Penyuluhan Hukum; 2. Jumlah Sosialisasi Produk Hukum Daerah; 3. Jumlah Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum. 	Jumlah Penyuluhan Hukum, Sosialisasi Produk Hukum Daerah, Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum	Bagian Hukum Setda. Kab. Jember	Bagian Hukum Setda. Kab. Jember

RENCANA STRATEGIS BAGIAN HUKUM

Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib,nyaman dan berkeadilan	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib,nyaman dan berkeadilan	1. Meningkatkan Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	Produk Hukum yang dihasilkan, Jumlah Perda yang sudah diundangkan	100 %	673	675	676	678	680	Persentasi Perda yang diusulkan ke DPRD	Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
											Persentasi Perbup yang diundangkan		
											Persentasi SK yang ditetapkan		
			2. Meningkatkan pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum	Perkara yang dapat diselesaikan , Bantuan Hukum miskin yang dapat dibantu	100 %	113	114	115	116	117	Jumlah Penyelesaian Permasalahan hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan	Meningkatnya pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum	
											Jumlah bantuan hukum bagi Masyarakat miskin		



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN SUDARMAN NOMOR 1 JEMBER TELEPON (0331) 428824

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. ZAENURROFIK, S.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : HADI SASMITO, S.H., M.Si
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER,**



HADI SASMITO, S.H., M.Si
NIP. 196804071998031009

Jember, 21 November 2023
Pihak Pertama
KEPALA BAGIAN HUKUM,



A. ZAENURROFIK, S.H
NIP. 198307212009122003

**PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. JEMBER**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Bagian Hukum	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%
2.	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Bagian Hukum	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%
3.	Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Bagian Hukum	Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%
4.	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Bagian Hukum	Persentase administrasi umum yang terkelola	100%
5.	Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Bagian Hukum	Terpenuhinya jasa surat menyurat, jasa telepon dan jasa tenaga administrasi (non ASN)	100%
6.	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Hukum	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas serta sarana dan prasarana lainnya	100%
7.	Peningkatan Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Produk Hukum Daerah	Persentase koordinasi dan fasilitasi produk hukum daerah	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 114.600.000,00	P-APBD
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 45.400.000,00	P-APBD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 696.269.700,00	P-APBD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 229.772.200,00	P-APBD
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 40.000.000,00	P-APBD
6. Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Rp 2.478.717.100,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 3.604.759.000,00	

Jember, 21 November 2023

KEPALA BAGIAN HUKUM,

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER,**



HADI SASMITO, S.H., M.Si
NIP. 196804071998031009

A. ZAENURROFIK, S.H.





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

JL. SUDARMAN NO. 1 ☎️ (0331) 424044 JEMBER

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2024

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib, nyaman dan berkeadilan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan, Jumlah Perda yang sudah diusulkan ke DPRD
				Jumlah Perkara yang dapat diselesaikan, Bantuan Hukum miskin yang dapat dibantu
				Jumlah Produk Hukum yang terpublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat

RKT

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kategori dan Nilai evaluasi fasilitasi dan koordinasi produk hukum dan permasalahan hukum	75 (BB)				
Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	Produk hukum yang dihasilkan							Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk hukum yang dihasilkan	673 dokumen	606.683.200

Meningkatnya Pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum bagi PNS dlm Hubungan kedinasan dan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin	Permasalahan hukum yang terselesaikan							Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Perkara/Pe penyelesaian permasalahan hukum yang terselesaikan dan Bantuan yang diberikan	113 perkara	1.700.404.800
Meningkatnya pemberian informasi hukum kepada masyarakat	Produk hukum yang terpublikasikan							Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum yang terdokumentasi	600	94.000.000

					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kategori dan Nilai Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember	74,45 (BB)				
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Jumlah produk hukum yang dihasilkan, permasalahan yang diselesaikan dan dokumen yang terpublikasikan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Hukum	% Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	% Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; Perubahan RKA-SKPD; DPA-SKPD; Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; Perubahan RKA-SKPD; DPA-SKPD; Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.635.600
		Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Hukum	% administrasi keuangan yang dikelola	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% administrasi keuangan yang dikelola	100%	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	114.480.000

									Pelaksanaan Tugas ASN		
		Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Bagian Hukum	% Terpenuhinya pakaian dinas beserta kelengkapannya	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Terpenuhinya pakaian dinas beserta kelengkapannya	100%	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 paket	63.750.000
		Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Hukum	% administrasi umum yang dikelola	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% administrasi umum yang dikelola	100%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	211.019.200
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	10.650.100
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 paket	225.746.400

									yang Disediakan		
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	7.230.000
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	218.500.000
		Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Bagian Hukum	% Terpenuhinya jasa surat menyurat, jasa telepon dan jasa tenaga administrasi (non ASN)	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Terpenuhinya jasa surat menyurat, jasa telepon dan jasa tenaga administrasi (non ASN)	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	9.300.000
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi	12 laporan	10.800.700

								Daya Air dan Listrik	i, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	633.445.000
		Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Hukum	% barang milik daerah yang terpelihara	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% barang milik daerah yang terpelihara	100%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	25.000.000



CASCADING BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

